

FRAMING KOMUNIKASI PEMERINTAH TERHADAP RENCANA PENGGUNAAN RP11 TRILIUN APBN UNTUK PEMBUKAAN REKENING MASSAL DALAM PERSPEKTIF SILA KELIMA PANCASILA

Muhammad Rafiq Khadafi¹, Robito Lintang Adzani², Robiyansah³, Ikhsan Ahmad⁴

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹⁻⁴

Email: rafiqkhadafi8@gmail.com¹, robitolintang@gmail.com², robiansah24434@gmail.com³,
ikhsan@untirta.ac.id⁴

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 10
Bulan : Oktober
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Rencana pemerintah untuk melakukan pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat menjadi salah satu isu kebijakan ekonomi yang mendapat perhatian publik pada September 2026. Isu tersebut semakin berkembang setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp11 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila pembukaan rekening ditujukan kepada sekitar 200 juta penduduk dengan saldo awal Rp50.000 per rekening. Pernyataan tersebut kemudian memperoleh penjelasan lanjutan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa angka Rp11 triliun belum merupakan anggaran yang ditetapkan karena kebutuhan anggaran masih dalam proses penghitungan. Perkembangan berikutnya menunjukkan perubahan sasaran dan estimasi, ketika Airlangga menyampaikan bahwa sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening dan kebutuhan dana diperkirakan sekitar Rp3,8 triliun. Fenomena perubahan informasi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi pemerintah dalam membentuk pemahaman publik terhadap suatu kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi pemerintah mengenai rencana pembukaan rekening massal dibingkai menggunakan model framing Robert N. Entman serta bagaimana framing tersebut dipahami dalam perspektif Sila Kelima Pancasila. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert N. Entman yang terdiri atas empat perangkat, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Data penelitian berupa pernyataan dan komunikasi pejabat pemerintah yang berkaitan dengan rencana pembukaan rekening massal serta pemberitaan yang memuat pernyataan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah membingkai kebijakan terutama sebagai upaya memperluas inklusi keuangan, mempermudah penyaluran bantuan pemerintah, serta memberikan akses rekening kepada masyarakat yang belum memilikinya. Pada saat yang sama, perubahan estimasi anggaran dari sekitar Rp11 triliun menjadi sekitar Rp3,8 triliun menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan berlangsung secara dinamis dan masih berada dalam tahap penyusunan. Dalam perspektif Sila Kelima, framing tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip pemerataan akses dan distribusi manfaat kebijakan, tetapi juga menuntut komunikasi yang transparan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai sasaran, mekanisme, dan penggunaan APBN.

Keyword: komunikasi pemerintah, framing, Robert N. Entman, APBN, rekening massal, Sila Kelima Pancasila.

A. PENDAHULUAN

Komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dalam proses penyampaian kebijakan publik kepada masyarakat. Suatu kebijakan tidak hanya membutuhkan keputusan administratif dan dukungan anggaran, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang dapat menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah, mengapa kebijakan tersebut dibuat, siapa yang menjadi sasaran, serta bagaimana masyarakat akan memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan yang berkaitan langsung dengan penggunaan APBN, kebutuhan terhadap komunikasi yang jelas menjadi semakin penting karena anggaran negara pada dasarnya merupakan sumber daya publik yang penggunaannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah rencana pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat Indonesia yang berkembang pada September 2026. Pada 8 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pembukaan rekening massal melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Rencana tersebut disebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat memiliki rekening bank serta memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Mekanisme yang disiapkan juga direncanakan menggunakan basis data kependudukan dan teknologi digital.

Sehari setelahnya, isu tersebut berkembang menjadi pembahasan mengenai kebutuhan anggaran. Airlangga menyebut bahwa apabila sasaran program mencapai sekitar 200 juta penduduk dan setiap rekening memperoleh saldo awal Rp50.000, kebutuhan dana diperkirakan sekitar Rp11 triliun. Airlangga menyebut sumber dana tersebut berasal dari APBN. Namun, pada tahap tersebut belum dipastikan apakah kebutuhan anggaran akan dibebankan pada APBN 2026 atau APBN 2027.

Pernyataan tersebut kemudian menghasilkan perkembangan komunikasi pemerintah yang berbeda. Pada 10 September 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa anggaran Rp11 triliun belum ditetapkan dan perhitungan kebutuhan anggaran masih dilakukan. Dengan demikian, angka Rp11 triliun lebih tepat dipahami sebagai proyeksi awal

berdasarkan asumsi jumlah penerima dan besaran saldo awal, bukan sebagai angka anggaran final.

Perubahan tersebut menjadi menarik dari perspektif komunikasi karena masyarakat menerima informasi kebijakan melalui beberapa pernyataan pemerintah dalam waktu yang relatif berdekatan. Pada tahap awal, angka Rp11 triliun menjadi informasi yang paling menonjol. Setelah itu, muncul penjelasan bahwa angka tersebut belum final. Perkembangan selanjutnya kembali menunjukkan perubahan ketika pada 23–24 September Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah memperkirakan sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening dan kebutuhan dana untuk saldo awal Rp50.000 diperkirakan sekitar Rp3,8 triliun.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan bukan merupakan proses yang selalu berjalan dalam satu arah dan menghasilkan pesan yang tetap. Pesan pemerintah dapat berkembang seiring dengan proses penghitungan, koordinasi antarlembaga, serta penentuan sasaran program. Bahkan pada 1 Oktober 2026, Airlangga menyampaikan bahwa pembukaan rekening diarahkan kepada warga berusia di atas 17 tahun pada kelompok desil 1 sampai desil 4, sementara jumlah penerima dan angka anggaran masih dalam proses pengecekan dengan kementerian terkait.

Fenomena ini penting dikaji karena angka Rp11 triliun sempat menjadi pusat perhatian publik, sementara perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa angka tersebut bukan angka final. Dalam penelitian komunikasi, kondisi semacam ini menarik karena cara suatu kebijakan disampaikan dapat memengaruhi cara masyarakat memahami persoalan, tujuan, manfaat, maupun konsekuensi kebijakan tersebut. Komunikasi pemerintah tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interpretasi mengenai suatu kebijakan.

1.1 Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintah dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi, pesan, kebijakan, dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, komunikasi pemerintah berlangsung melalui berbagai saluran, seperti konferensi pers, pernyataan pejabat, media pemerintah, media massa, media sosial, dan dokumen resmi.

Dalam isu pembukaan rekening massal, komunikasi pemerintah terlihat melalui pernyataan pejabat yang secara langsung menjelaskan arah kebijakan. Airlangga menyampaikan tujuan program melalui gagasan pemerataan kepemilikan rekening dan

penguatan inklusi keuangan. Pemerintah juga menjelaskan bahwa rekening tersebut nantinya dapat digunakan sebagai sarana penyaluran berbagai bantuan pemerintah. OJK juga menyatakan bahwa pembukaan rekening massal memiliki kaitan dengan keberlanjutan literasi keuangan, sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rekening baru dapat digunakan untuk menyalurkan bantuan seperti bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan tunai, dan program lainnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyampaian angka anggaran. Pemerintah juga membangun alasan mengenai mengapa program tersebut diperlukan. Dengan demikian, pesan kebijakan memiliki unsur informasi sekaligus unsur pemaknaan. Masyarakat tidak hanya diberitahu bahwa pemerintah akan membuka rekening, tetapi juga diberi pemahaman mengenai fungsi rekening tersebut dalam sistem bantuan dan inklusi keuangan.

Penelitian Sukma Alam mengenai pemberitaan komunikasi pemerintah pada masa pandemi menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dapat menjadi objek framing karena media melakukan seleksi dan penonjolan terhadap bagian tertentu dari komunikasi tersebut. Penelitian tersebut menggunakan framing Robert N. Entman untuk melihat bagaimana komunikasi pemerintah dibingkai oleh Detik.com, Kompas.com, dan Kumparan.com. Hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing media memberikan penekanan yang berbeda terhadap persoalan komunikasi pemerintah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah memiliki posisi penting dalam proses pembentukan pemahaman publik. Ketika pemerintah menyampaikan suatu kebijakan, pesan tersebut dapat menjadi sumber utama bagi media dalam mengembangkan pemberitaan. Karena itu, analisis terhadap komunikasi pemerintah dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu kebijakan didefinisikan dan dijelaskan kepada masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan temuan bahwa pemberitaan kebijakan tidak sekadar menyajikan fakta, melainkan “membentuk pemahaman publik melalui cara bagaimana isu tersebut dibingkai” (Octaviani & Gono, 2025).

1.2 Framing sebagai Cara Melihat Komunikasi Kebijakan

Framing digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pemerintah mengonstruksi pesan mengenai kebijakan pembukaan rekening massal. Framing tidak hanya memperhatikan informasi apa yang disampaikan, tetapi juga aspek apa yang dipilih untuk ditonjolkan dan bagaimana suatu permasalahan dijelaskan.

Entman menjelaskan framing sebagai proses memilih beberapa aspek dari realitas yang dipersepsikan dan membuat aspek tersebut lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dengan demikian, suatu komunikasi dapat menampilkan bagian tertentu dari realitas secara lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Penelitian tentang framing kebijakan efisiensi anggaran yang menggunakan model Entman juga menempatkan proses seleksi dan penonjolan sebagai bagian penting dalam pembentukan pemaknaan terhadap kebijakan pemerintah. Proses tersebut dilakukan melalui “pemilihan fakta tertentu, penonjolan aspek tertentu dan penggunaan narasi” yang membentuk makna sosial bagi khalayak (Barus & Cindoswari, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, framing digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah mendefinisikan persoalan kepemilikan rekening, bagaimana pemerintah menjelaskan penyebab atau latar belakang kebijakan, nilai apa yang digunakan untuk menjelaskan kebijakan, dan tindakan apa yang ditawarkan sebagai solusi.

Dengan demikian, framing memungkinkan penelitian melihat komunikasi pemerintah secara lebih mendalam. Penelitian tidak hanya mencatat bahwa pemerintah mengatakan akan membuka rekening massal, tetapi mencoba memahami konstruksi pesan di balik pernyataan tersebut.

1.3 Hubungan dengan Sila Kelima Pancasila

Kebijakan yang menggunakan APBN memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat karena sumber daya yang digunakan merupakan sumber daya publik. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut dapat dilihat melalui prinsip keadilan sosial yang terdapat dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Prinsip keadilan sosial dalam Sila Kelima bahkan dipandang “seharusnya dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan publik” (Nuraini dkk., 2025).

Keadilan sosial tidak hanya dapat dipahami sebagai perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan kesempatan dan distribusi manfaat kebijakan. Penelitian Intan Nuraini dkk. Mengenai optimalisasi nilai keadilan sosial dalam Sila Kelima menjelaskan bahwa penerapan nilai keadilan sosial dalam kebijakan publik berkaitan dengan distribusi sumber daya yang adil, perhatian terhadap kelompok rentan, serta penerapan keadilan substantif.

Dalam kasus pembukaan rekening massal, prinsip tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah komunikasi pemerintah menampilkan kebijakan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Pada saat yang sama, analisis juga dapat melihat

bagaimana pemerintah menjelaskan kelompok sasaran, distribusi manfaat, dan penggunaan anggaran publik.

Perspektif Sila Kelima dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menentukan secara sederhana bahwa kebijakan pemerintah benar atau salah. Sila Kelima digunakan sebagai perspektif interpretatif untuk melihat bagaimana narasi mengenai pemerataan, akses, manfaat, dan kepentingan masyarakat dibangun dalam komunikasi pemerintah.

1.4 Penelitian Terhadulu

Penelitian pertama yang relevan adalah penelitian Sukma Alam berjudul “Bingkai Media terhadap Berita Komunikasi Pemerintah di Pandemi COVID-19”. Penelitian tersebut menggunakan analisis framing Robert N. Entman untuk menganalisis pemberitaan komunikasi pemerintah pada Detik.com, Kompas.com, dan Kumparan.com. Penelitian menemukan adanya perbedaan framing antar-media dalam melihat komunikasi pemerintah. Penelitian ini relevan karena sama-sama menjadikan komunikasi pemerintah sebagai objek utama analisis framing.

Penelitian kedua adalah “Analisis Framing Berita di Media Lembaga Pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” yang diterbitkan dalam Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Penelitian tersebut menggunakan framing Robert Entman untuk menganalisis bagaimana isu kebijakan SPBE dikemas dalam media internal lembaga pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa media pemerintah dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi kebijakan sekaligus membentuk cara isu pemerintah dipahami oleh publik.

Penelitian ketiga adalah penelitian mengenai framing kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo pada Kumparan.com dan Kompas.com. Penelitian tersebut menggunakan model, Robert N. Entman dan menunjukkan bahwa kedua media memiliki kecenderungan framing yang berbeda terhadap kebijakan anggaran. Kumparan lebih kritis terhadap dampak kebijakan, sedangkan Kompas cenderung lebih moderat dan menekankan aspek teknis serta administratif.

Penelitian keempat adalah penelitian mengenai pembingkaiian pemberitaan kebijakan efisiensi anggaran pada RRI.co.id. Penelitian tersebut menggunakan dokumentasi dan observasi terhadap berita RRI.co.id, kemudian menganalisisnya menggunakan model Entman. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemberitaan menampilkan kritik dan kekhawatiran publik terhadap dampak kebijakan, sementara pada bagian solusi terdapat penekanan terhadap kolaborasi, kehati-hatian, dan transparansi pemerintah.

Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa framing Entman telah banyak digunakan untuk memahami konstruksi komunikasi mengenai kebijakan pemerintah. Namun,

sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana media membingkai kebijakan atau komunikasi pemerintah, bukan pada perkembangan komunikasi pemerintah itu sendiri mengenai suatu kebijakan yang masih dalam tahap perumusan.

1.5 Research Gap

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah penelitian. Pertama, penelitian mengenai komunikasi pemerintah yang menggunakan framing Entman banyak dilakukan terhadap pemberitaan media, sehingga posisi komunikasi asli pemerintah sebagai sumber pesan belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini menempatkan pernyataan pejabat pemerintah sebagai data utama yang kemudian dianalisis untuk melihat konstruksi pesan kebijakan.

Kedua, penelitian mengenai kebijakan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk penelitian tentang efisiensi anggaran, berfokus pada kebijakan yang sudah memiliki bentuk implementasi yang lebih jelas. Penelitian ini mengambil kasus pembukaan rekening massal yang pada periode penelitian masih mengalami perubahan sasaran dan perhitungan anggaran. Perubahan dari proyeksi awal sekitar Rp11 triliun menjadi sekitar Rp3,8 triliun menunjukkan dinamika komunikasi kebijakan yang menarik untuk dianalisis.

Ketiga, penelitian framing komunikasi pemerintah sebelumnya belum banyak menghubungkan hasil framing dengan perspektif Sila Kelima Pancasila secara khusus. Padahal kebijakan yang menggunakan APBN memiliki hubungan dengan pemerataan manfaat dan keadilan sosial.

Keempat, penelitian ini berusaha menggabungkan kajian komunikasi pemerintah, framing Entman, dan perspektif Sila Kelima dalam satu analisis terhadap kasus kebijakan rekening massal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat isi komunikasi pemerintah, tetapi juga bagaimana konstruksi pesan tersebut dapat dimaknai dari sudut pandang keadilan sosial.

1.6 Rumusan Masalah

Bagaimana framing komunikasi pemerintah terhadap rencana penggunaan Rp11 triliun APBN untuk pembukaan rekening massal berdasarkan model Robert N. Entman dalam perspektif Sila Kelima Pancasila?

1.7 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing komunikasi pemerintah terhadap rencana penggunaan Rp11 triliun APBN untuk pembukaan rekening massal menggunakan

model framing Robert N. Entman serta menganalisis konstruksi komunikasi tersebut dalam perspektif Sila Kelima Pancasila.

Tinjauan Pustaka

2.1 Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintah merupakan proses penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat, lembaga, maupun kelompok yang berkepentingan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam komunikasi kebijakan, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat keputusan, tetapi juga sebagai komunikator yang menjelaskan alasan, tujuan, sasaran, dan mekanisme kebijakan.

Komunikasi pemerintah menjadi penting karena masyarakat membutuhkan informasi untuk memahami kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara jelas dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara maksud pemerintah dengan interpretasi masyarakat. Dalam konteks kebijakan anggaran, keberhasilan kebijakan “sangat tergantung pada kejelasan prioritas pemerintah, transparansi penggunaan anggaran serta dukungan komunikasi politik yang efektif” (Barus & Cindoswari, 2025).

Dalam perkembangan komunikasi digital, pemerintah memiliki lebih banyak saluran untuk menyampaikan pesan secara langsung. Media pemerintah, situs resmi, media sosial, konferensi pers, dan pernyataan pejabat dapat menjadi sumber komunikasi langsung pemerintah. Penelitian mengenai media lembaga pemerintah terkait SPBE menunjukkan bahwa media pemerintah dapat digunakan untuk menyampaikan kebijakan, membangun transparansi, dan memengaruhi evaluasi publik terhadap pemerintah.

Dalam kasus rekening massal, komunikasi pemerintah berlangsung melalui pernyataan pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. Pernyataan tersebut tidak hanya menjelaskan teknis kebijakan, tetapi juga memberikan alasan mengenai tujuan program, sumber dana, sasaran penerima, dan tahapan pelaksanaan.

Komunikasi pemerintah dengan demikian dapat dipahami sebagai bagian dari proses konstruksi kebijakan di ruang publik. Kebijakan yang masih berada pada tahap perumusan membutuhkan komunikasi yang hati-hati karena informasi yang disampaikan dapat mengalami perubahan mengikuti proses teknis dan politik.

2.2 Framing

Framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana suatu realitas dipilih, disusun, dan ditonjolkan dalam pesan komunikasi. Realitas yang kompleks tidak mungkin seluruhnya

disampaikan dalam satu pesan. Karena itu, komunikator melakukan seleksi terhadap aspek tertentu.

Dalam penelitian komunikasi, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana sebuah isu dibangun melalui pilihan informasi, aktor, istilah, penjelasan, dan solusi. Framing tidak hanya berkaitan dengan apakah suatu isu diberitakan secara positif atau negatif, tetapi berkaitan dengan bagaimana isu tersebut didefinisikan. Dengan demikian, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga “membangun makna melalui perspektif yang ditampilkan dan ditekankan dalam pemberitaan” (Yulianita dkk., 2026).

Penelitian tentang kebijakan efisiensi anggaran pada Kompas.com dan Kumparan.com menunjukkan bahwa perbedaan pemilihan dan penonjolan informasi dapat menghasilkan konstruksi makna yang berbeda terhadap kebijakan yang sama. Perbedaan tersebut dapat “mencerminkan posisi ideologis, kedekatan terhadap kekuasaan maupun orientasi kepentingan redaksional” masing-masing media (Barus & Cindoswari, 2025).

Dalam penelitian ini, framing diterapkan pada komunikasi pemerintah. Artinya, yang dianalisis adalah bagaimana pemerintah melalui pernyataan pejabat mendefinisikan kebijakan rekening massal, menjelaskan alasan kebijakan, memberikan penilaian, dan menyampaikan tindakan yang akan dilakukan.

2.3 Framing Robert N Entman

Robert N. Entman merupakan salah satu tokoh penting dalam kajian framing. Dalam model Entman, framing dapat dilihat melalui empat fungsi utama.

Pertama, Define Problems, yaitu bagaimana suatu isu atau peristiwa didefinisikan sebagai masalah. Tahap ini menentukan bagian realitas mana yang dianggap penting untuk dibicarakan.

Kedua, Diagnose Causes, yaitu bagaimana sumber masalah atau penyebab suatu persoalan dijelaskan. Penyebab dapat ditempatkan pada individu, kondisi sosial, struktur, atau kebijakan tertentu.

Ketiga, Make Moral Judgment, yaitu bagaimana nilai atau penilaian digunakan untuk memberikan makna terhadap masalah. Pada tahap ini, komunikator dapat menjelaskan mengapa suatu kondisi dianggap penting, baik, buruk, perlu diperbaiki, atau perlu dipertahankan.

Keempat, Treatment Recommendation, yaitu bagaimana solusi atau tindakan yang ditawarkan untuk menghadapi masalah. Elemen ini menunjukkan arah penyelesaian yang dibangun melalui komunikasi.

2.4 Sila Kelima Pancasila

Sila Kelima Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai keadilan sosial berkaitan dengan upaya menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh hak, kesempatan, dan manfaat secara adil.

Dalam konteks kebijakan publik, keadilan sosial dapat digunakan untuk melihat apakah kebijakan memberikan manfaat yang dapat diakses secara adil oleh masyarakat. Penelitian mengenai optimalisasi Sila Kelima dalam mengurangi kesenjangan menempatkan distribusi sumber daya, pemerataan akses, dan perhatian terhadap kelompok rentan sebagai bagian penting dari keadilan sosial.

Konsep tersebut relevan dengan program rekening massal karena pemerintah mengkomunikasikan kebijakan sebagai upaya memperluas kepemilikan rekening. Program tersebut juga dikaitkan dengan penyaluran bantuan pemerintah. Dengan demikian, terdapat hubungan antara akses terhadap rekening, akses terhadap layanan keuangan, dan distribusi manfaat kebijakan.

Namun, keadilan sosial tidak hanya dilihat dari banyaknya masyarakat yang menerima manfaat. Penggunaan anggaran publik juga perlu dipahami melalui aspek ketepatan sasaran, transparansi, dan efektivitas. Oleh karena itu, perspektif Sila Kelima digunakan untuk membaca hasil framing, bukan sebagai alat untuk memberikan penilaian administratif terhadap kebijakan. Implementasi keadilan sosial memang kerap menghadapi tantangan seperti “ketimpangan akses layanan dasar, birokrasi yang lambat, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya” (Aqiilah & Najicha, 2023, dalam Nuraini dkk., 2025).

2.5 Kerangka Berpikir

Pernyataan pemerintah tersebut menjadi data penelitian. Data kemudian dianalisis menggunakan model framing Robert N. Entman melalui empat elemen, yaitu Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, dan Treatment Recommendation.

Hasil framing kemudian dianalisis dalam perspektif Sila Kelima untuk melihat bagaimana komunikasi mengenai pemerataan akses, distribusi manfaat, kepentingan publik, dan penggunaan sumber daya negara dikonstruksi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan terhadap teks komunikasi pemerintah, bukan pada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan

peneliti melihat bagaimana pemerintah membangun realitas melalui bahasa, pilihan informasi, penjelasan kebijakan, dan penekanan terhadap aspek tertentu.

Dalam penelitian ini, komunikasi pemerintah mengenai rencana pembukaan rekening massal diperlakukan sebagai teks yang mengandung konstruksi makna. Pendekatan tersebut sesuai dengan penelitian framing karena framing pada dasarnya digunakan untuk memahami bagaimana realitas dikonstruksi melalui pesan. Penelitian framing komunikasi pemerintah sebelumnya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis framing untuk melihat penonjolan serta seleksi isu dalam komunikasi pemerintah.

3.2 Metode Analisis Framing Robert N Entman

Metode analisis yang digunakan adalah analisis framing Robert N. Entman. Model ini digunakan karena penelitian berfokus pada bagaimana pemerintah membentuk pemahaman mengenai masalah, penyebab, nilai, dan solusi dalam komunikasi mengenai pembukaan rekening massal.

Empat elemen yang digunakan adalah:

- A. Define Problems, untuk melihat bagaimana pemerintah mendefinisikan persoalan yang melatarbelakangi pembukaan rekening massal.
- B. Diagnose Causes, untuk melihat kondisi atau penyebab yang digunakan pemerintah dalam menjelaskan kebutuhan kebijakan.
- C. Make Moral Judgment, untuk melihat nilai atau pertimbangan yang digunakan dalam membenarkan atau menjelaskan kebijakan.
- D. Treatment Recommendation, untuk melihat solusi atau tindakan yang ditawarkan pemerintah.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah komunikasi pemerintah mengenai rencana pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat, terutama komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran, tujuan program, sasaran penerima, mekanisme pelaksanaan, dan manfaat program.

Periode data utama berada pada September sampai awal Oktober 2026 karena periode tersebut memperlihatkan perkembangan komunikasi yang cukup intensif, termasuk munculnya angka Rp11 triliun, klarifikasi bahwa angka tersebut belum final, perubahan estimasi menjadi sekitar Rp3,8 triliun, serta perkembangan sasaran program.

3.4 Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini berupa pernyataan pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan program, terutama pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan tersebut diperoleh melalui dokumentasi pemberitaan yang memuat pernyataan langsung pejabat. Data sekunder berupa pemberitaan media yang digunakan untuk memberikan konteks terhadap komunikasi pemerintah. Media yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, keterpercayaan, dan kelengkapan informasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan pernyataan pemerintah dan pemberitaan yang berkaitan dengan pembukaan rekening massal. Data dikumpulkan berdasarkan kata kunci seperti “rekening massal”, “pembukaan rekening”, “Rp11 triliun”, “APBN”, dan “saldo awal Rp50 ribu”.

Data kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Pola ini memiliki kesamaan dengan penelitian framing RRI.co.id yang menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan berita berdasarkan kata kunci tertentu sebelum melakukan analisis framing.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengumpulkan seluruh komunikasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Kedua, peneliti menyeleksi data yang memuat pernyataan pemerintah mengenai tujuan, anggaran, sasaran, dan mekanisme pembukaan rekening massal.

Ketiga, data dikelompokkan berdasarkan empat elemen framing Entman.

Keempat, setiap elemen diinterpretasikan untuk menemukan pola komunikasi pemerintah.

Kelima, hasil framing dianalisis menggunakan perspektif Sila Kelima Pancasila.

Untuk menjaga keterlacakan analisis, data disusun dalam tabel yang memuat tanggal, sumber, aktor pemerintah, isi pernyataan, serta hasil identifikasi empat elemen framing.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Komunikasi Pemerintah

Data penelitian menunjukkan bahwa komunikasi mengenai rekening massal berkembang melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah penyampaian rencana dan mekanisme. Pada 8 September 2026, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme pembukaan rekening massal melalui BRI dan BSI. Program tersebut dikaitkan

dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan warga memiliki rekening serta memperkuat inklusi dan literasi keuangan.

Tahap kedua adalah munculnya estimasi anggaran Rp11 triliun. Pada 9 September 2026, Airlangga menyebut bahwa jika program mencakup sekitar 200 juta penduduk dengan saldo awal Rp50.000, kebutuhan dana diperkirakan sekitar Rp11 triliun dari APBN.

Tahap ketiga adalah klarifikasi dari Menteri Keuangan. Pada 10 September, Purbaya menyatakan bahwa Rp11 triliun belum merupakan angka yang ditetapkan karena kebutuhan anggaran masih dihitung. Pernyataan ini menunjukkan adanya proses penyesuaian antara komunikasi awal dengan perhitungan fiskal yang lebih rinci.

Tahap keempat terjadi pada 23–24 September. Airlangga menyampaikan bahwa berdasarkan data kependudukan yang dipadupadankan, sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening. Dengan saldo awal Rp50.000, kebutuhan dana diperkirakan sekitar Rp3,8 triliun.

Tahap kelima terlihat pada 1 Oktober ketika sasaran program disebut diarahkan kepada masyarakat berusia di atas 17 tahun pada kelompok desil 1 sampai desil 4. Pada saat yang sama, jumlah penerima dan angka anggaran masih diperiksa kembali dengan kementerian terkait.

Data tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah mengalami perkembangan dari sasaran yang sangat luas dan proyeksi awal Rp11 triliun menuju sasaran yang lebih spesifik dan estimasi sekitar Rp3,8 triliun.

4.2 Define Problems

Pada elemen Define Problems, pemerintah membingkai persoalan utama sebagai masih adanya masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Pembukaan rekening massal kemudian diposisikan sebagai salah satu cara untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan.

Pada tahap awal, masalah didefinisikan secara luas melalui gagasan bahwa setiap warga negara perlu memiliki rekening. Airlangga menyampaikan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan.

Definisi masalah kemudian menjadi lebih spesifik setelah pemerintah memperoleh data mengenai jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening. Pada 24 September, Airlangga menyebut sekitar 74 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening. Dengan demikian, masalah tidak lagi dikonstruksi sebagai persoalan seluruh penduduk Indonesia, tetapi sebagai persoalan kelompok tertentu yang belum memiliki akses rekening.

Framing tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan universal menuju pendekatan yang lebih terarah. Perubahan tersebut penting karena menentukan bagaimana publik memahami tujuan program. Pada awalnya program dapat dipahami sebagai pembukaan rekening untuk hampir seluruh masyarakat, sedangkan perkembangan komunikasi menunjukkan bahwa sasaran lebih diarahkan kepada masyarakat yang belum memiliki rekening.

4.3 Diagnose Causes

Pada elemen Diagnose Causes, pemerintah tidak menempatkan satu pihak tertentu sebagai penyebab persoalan. Penyebab lebih banyak dikonstruksi sebagai kondisi kurangnya kepemilikan rekening di sebagian masyarakat serta kebutuhan untuk memperluas inklusi keuangan.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk memiliki sarana yang lebih mudah dalam menyalurkan bantuan. OJK menyebut pembukaan rekening massal sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi keuangan, sedangkan komunikasi pemerintah lainnya menghubungkan rekening tersebut dengan penyaluran bantuan sosial.

Dengan demikian, penyebab atau latar belakang kebijakan dibangun melalui persoalan akses dan efektivitas penyaluran program pemerintah. Pemerintah tidak membingkai masalah sebagai kegagalan individu masyarakat dalam memiliki rekening, tetapi lebih sebagai kondisi yang perlu ditangani melalui intervensi kebijakan.

Perubahan angka sasaran juga menunjukkan adanya proses pencarian data yang lebih akurat. Perhitungan awal 200 juta penduduk menghasilkan proyeksi Rp11 triliun, sedangkan penggunaan data mengenai masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening menghasilkan estimasi sekitar Rp3,8 triliun.

4.4 Make Moral Judgement

Pada elemen Make Moral Judgment, pemerintah memberikan nilai positif terhadap pembukaan rekening massal melalui konsep inklusi keuangan, pemerataan kepemilikan rekening, kemudahan akses, dan ketepatan penyaluran bantuan.

Pemerataan menjadi salah satu kata kunci dalam komunikasi pemerintah. Airlangga menyebut bahwa pemerintah mendorong pembukaan rekening agar kepemilikannya merata bagi seluruh warga negara.

Nilai positif juga terlihat dari pengaitan rekening dengan bantuan pemerintah. Rekening tidak diposisikan hanya sebagai produk perbankan, tetapi sebagai infrastruktur untuk memudahkan masyarakat menerima berbagai bantuan. Komunikasi pemerintah mengenai

program tersebut menyebut bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan tunai, dan program lain sebagai manfaat yang dapat disalurkan melalui rekening.

Dengan demikian, penilaian moral yang dibangun pemerintah cenderung menempatkan kebijakan sebagai langkah yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi. Kebijakan diposisikan sebagai upaya memperluas akses, bukan sekadar sebagai pengeluaran APBN.

4.5 Treatment Recommendation

Pada elemen Treatment Recommendation, pemerintah menawarkan pembukaan rekening sebagai tindakan untuk mengatasi masalah keterbatasan akses rekening.

Pada tahap awal, solusi yang ditawarkan berupa pembukaan rekening melalui BRI dan BSI dengan basis data kependudukan. Pemerintah juga menyebut penggunaan aplikasi digital untuk mendukung mekanisme tersebut.

Solusi kemudian berkembang melalui pemberian saldo awal sebesar Rp50.000. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp3,8 triliun berdasarkan jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening.

Treatment Recommendation juga terlihat dari rencana penggunaan rekening untuk penyaluran bantuan pemerintah. Dengan adanya rekening, pemerintah berharap distribusi bantuan dapat dilakukan lebih mudah dan tepat sasaran..

Dengan demikian, solusi yang dibangun pemerintah terdiri atas tiga unsur utama, yaitu pembukaan rekening, pemberian saldo awal, dan pemanfaatan rekening sebagai sarana penyaluran program pemerintah.

Pembahasan

5.1 Konstruksi Komunikasi Pemerintah

Hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi komunikasi pemerintah mengenai rekening massal dibangun melalui narasi akses, inklusi, pemerataan, dan kemudahan distribusi bantuan. Pemerintah tidak menampilkan kebijakan semata-mata sebagai program pengeluaran anggaran, tetapi sebagai instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan.

Konstruksi tersebut terlihat sejak komunikasi awal mengenai program. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah mempersiapkan rekening massal sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai framing komunikasi pemerintah pada masa pandemi yang menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah dapat menjadi isu yang kemudian dikonstruksi oleh media melalui penonjolan aspek tertentu.

5.2 Framing Pemerintah terhadap Penggunaan APBN

Dalam framing komunikasi pemerintah, APBN tidak ditampilkan sebagai persoalan utama. Fokus komunikasi lebih diarahkan pada manfaat program. Angka Rp11 triliun muncul sebagai hasil perhitungan berdasarkan asumsi 200 juta penerima dan saldo awal Rp50.000.

Ketika Purbaya memberikan klarifikasi bahwa angka Rp11 triliun belum final, framing mengenai APBN berubah. Anggaran kemudian diposisikan sebagai sesuatu yang masih perlu dihitung berdasarkan jumlah penerima sebenarnya.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya dua lapisan komunikasi. Lapisan pertama menekankan kemampuan pemerintah menyediakan dana untuk menjalankan program. Lapisan kedua menekankan kehati-hatian fiskal melalui proses penghitungan anggaran.

Temuan ini dapat dibandingkan dengan penelitian tentang framing kebijakan efisiensi anggaran yang menunjukkan bahwa kebijakan APBN dapat dikonstruksi melalui penekanan yang berbeda. Penelitian tersebut menemukan bahwa Kompas menempatkan persoalan efisiensi secara lebih moderat dan menekankan perencanaan, transparansi, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa Kompas mendorong “pentingnya transparansi dan sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah” (Barus & Cindoswari, 2025).

Dalam kasus rekening massal, komunikasi pemerintah kemudian berkembang ke arah yang lebih terukur. Estimasi sekitar Rp3,8 triliun didasarkan pada data sekitar 74 juta masyarakat yang belum memiliki rekening, sehingga angka tersebut memiliki dasar perhitungan yang lebih spesifik dibandingkan proyeksi awal Rp11 triliun.

5.3 Framing dalam Perspektif Sila Kelima

Dari perspektif Sila Kelima, framing pemerintah menunjukkan keterkaitan kuat dengan konsep pemerataan akses. Pemerintah secara konsisten menghubungkan program dengan masyarakat yang belum memiliki rekening dan dengan upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan.

Hal tersebut sejalan dengan konsep keadilan sosial yang menekankan distribusi sumber daya dan akses secara adil. Penelitian Nuraini dkk. Menekankan bahwa Sila Kelima dalam kebijakan publik dapat diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang adil, pemerataan akses, dan perhatian kepada kelompok yang membutuhkan.

Program rekening massal dapat dipahami memiliki dimensi keadilan sosial apabila rekening tersebut benar-benar membantu masyarakat memperoleh akses yang sebelumnya

sulit diperoleh. Penggunaan rekening sebagai saluran bantuan juga dapat mendukung pemerataan manfaat kebijakan pemerintah.

Namun, perspektif Sila Kelima juga mengharuskan perhatian terhadap ketepatan sasaran. Program yang menggunakan APBN tidak cukup hanya dinilai dari banyaknya rekening yang dibuat. Yang lebih penting adalah apakah rekening tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Perubahan sasaran dari sekitar 200 juta penduduk menuju sekitar 74 juta masyarakat yang belum memiliki rekening menunjukkan adanya proses menuju penargetan yang lebih spesifik. Pada 1 Oktober, komunikasi pemerintah juga mengarah pada kelompok desil 1–4.

Dari sudut pandang keadilan sosial, penargetan tersebut dapat dipahami sebagai langkah menuju keadilan distributif karena sumber daya diarahkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Namun, penilaian tersebut tetap bergantung pada implementasi dan data penerima yang digunakan. Hal ini sejalan dengan gagasan keadilan substantif, yakni “memberikan dukungan tambahan bagi mereka yang kurang mampu agar tercipta kesetaraan” (Nuraini dkk., 2025).

5.4 Implikasi Komunikasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah memiliki implikasi terhadap cara masyarakat memahami suatu kebijakan. Ketika angka Rp11 triliun pertama kali muncul, publik memperoleh gambaran bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam jumlah tersebut. Klarifikasi berikutnya bahwa angka tersebut belum final menunjukkan pentingnya penyebutan status informasi secara jelas.

Dalam komunikasi kebijakan, perbedaan antara “proyeksi”, “rencana”, dan “anggaran yang telah ditetapkan” merupakan informasi yang penting. Ketidakjelasan istilah dapat membuat masyarakat memahami sebuah rencana sebagai keputusan final. Penelitian mengenai media pemerintah dan SPBE menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah memiliki hubungan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dalam isu ekonomi dan anggaran, upaya “menerjemahkan istilah-istilah teknis ekonomi ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh audiens non-spesialis” menjadi penting agar publik tidak keliru memahami status suatu angka (Yulianita dkk., 2026).

Dalam kasus rekening massal, komunikasi yang konsisten dan transparan diperlukan agar masyarakat dapat memahami perkembangan kebijakan tanpa menganggap perubahan angka sebagai kontradiksi yang tidak memiliki penjelasan. Pemerintah perlu menjelaskan alasan perubahan sasaran dan anggaran secara terbuka. Transparansi dianggap penting “agar

publik dapat memahami arah kebijakan dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpercayaan” (Octaviani & Gono, 2025).

Implikasi lain berkaitan dengan framing manfaat. Penekanan terhadap inklusi keuangan dan penyaluran bantuan dapat membantu masyarakat memahami tujuan program. Namun, komunikasi juga perlu menyampaikan aspek lain seperti mekanisme penggunaan data kependudukan, siapa penerima, bagaimana saldo awal diberikan, dan bagaimana anggaran dihitung.

Dengan demikian, komunikasi pemerintah yang efektif bukan hanya komunikasi yang mampu membangun penerimaan, tetapi juga komunikasi yang memberikan informasi yang cukup bagi publik untuk memahami kebijakan secara kritis. Transparansi fiskal bahkan ditempatkan sebagai “faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, investor, dan stabilitas ekonomi nasional” (Yulianita dkk., 2026).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis framing Robert N. Entman terhadap komunikasi pemerintah mengenai rencana pembukaan rekening massal, dapat disimpulkan bahwa pemerintah membangun framing kebijakan melalui empat unsur utama.

Pola komunikasi pemerintah menunjukkan adanya perkembangan dari komunikasi yang bersifat umum menuju komunikasi yang lebih terarah. Pada awal September, pemerintah menyampaikan proyeksi sekitar Rp11 triliun berdasarkan asumsi 200 juta penerima. Namun, angka tersebut kemudian diklarifikasi sebagai angka yang belum final. Pada 23–24 September, pemerintah menyampaikan estimasi sekitar Rp3,8 triliun berdasarkan sekitar 74 juta masyarakat yang belum memiliki rekening.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Rp11 triliun sebaiknya dipahami sebagai bagian dari perkembangan komunikasi kebijakan, bukan sebagai angka anggaran final. Perubahan angka justru menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian karena memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah mengikuti perkembangan proses perumusan kebijakan.

Dalam perspektif Sila Kelima Pancasila, framing pemerintah memiliki hubungan dengan prinsip keadilan sosial terutama melalui penekanan terhadap pemerataan akses dan distribusi manfaat. Pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening dapat dipahami sebagai upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan. Penggunaan rekening untuk

penyaluran bantuan juga memiliki potensi mendukung distribusi manfaat kebijakan secara lebih terarah.

Namun, prinsip keadilan sosial juga menuntut adanya ketepatan sasaran, transparansi, dan pengelolaan sumber daya publik yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, framing yang menekankan pemerataan perlu disertai komunikasi yang jelas mengenai siapa penerima program, berapa anggaran yang sebenarnya dibutuhkan, bagaimana data penerima ditentukan, dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

Dengan demikian, jawaban terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah bahwa komunikasi pemerintah mengenai rencana pembukaan rekening massal membangun framing yang terutama menempatkan kebijakan sebagai upaya memperluas inklusi keuangan, pemerataan kepemilikan rekening, dan mempermudah penyaluran bantuan pemerintah. Framing tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai Sila Kelima dalam aspek pemerataan akses dan distribusi manfaat, tetapi penerapan nilai keadilan sosial tidak dapat hanya dilihat dari narasi komunikasi. Implementasi, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan manfaat nyata bagi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keadilan sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2026, September 9). Airlangga: Pemerintah siapkan Rp11 triliun untuk rekening massal. <https://www.antaraneews.com/berita/5733532/airlangga-pemerintah-siapkan-rp11-triliun-untuk-rekening-massal>
- Bank Indonesia. (2024). Laporan inklusi dan literasi keuangan nasional: Perluasan akses layanan keuangan masyarakat. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/>
- Candra, R. (2023). Peran Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kebijakan fiskal dan distribusi sumber daya. *Jurnal Government Policy (JGP)*, 8(2), 45–58.
- CNBC Indonesia. (2026, September 10). Purbaya: Anggaran rekening massal belum dihitung, tak sampai Rp11 T. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260910142613-4-766951/purbaya-anggaran-rekening-massal-belum-dihitung-tak-sampai-rp11-t>
- CNN Indonesia. (2026, September 10). Purbaya: Anggaran buka rekening 200 juta warga belum final. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260910153431-532-1402449/purbaya-anggaran-buka-rekening-200-juta-warga-belum-final>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of*

- Communication, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2002). Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media. LKIS Pelangi Aksara.
- Infobanknews. (2026, September 9). Pemerintah siapkan Rp11 triliun untuk rekening massal, ini skemanya. <https://infobanknews.com/pemerintah-siapkan-rp11-triliun-untuk-rekening-massal-ini-skemanya>
- Kaelan. (2020). Pendidikan Pancasila: Yuridis, kenegaraan, dan filsafat. Paradigma.
- Liputan6.com. (2026, September 9). Pemerintah siapkan Rp 11 triliun untuk buka rekening massal. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/8288411/pemerintah-siapkan-rp-11-triliun-untuk-buka-rekening-massal>
- Mardiasmo. (2021). Perpajakan dan kebijakan fiskal di Indonesia. Andi Publisher.
- Olivia, F. J., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieico, E. (2023). Analisis framing model Robert N. Entman tentang penerapan kembali tilang manual Jakarta di Kompas.com dan Tempo.com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 492–498.
- Pratama, R. A., & Wibowo, S. (2022). Strategi komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan publik di era digital. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 10(2), 115–128.
- Utami, D. P., & Setiawan, B. (2023). Transparansi dan akuntabilitas komunikasi kebijakan anggaran pemerintah pusat. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 14(1), 45–60.
- Zahra, A. U., & Odrada, Y. M. (2025). Framing media terhadap netralitas ASN dalam Pilkada: Analisis model Robert N. Entman. *Jurnal Politik Transformatif*, 1(1), 71–82.
- Yulianita, N. D., Vinianto, A., & Al-Faqih, M. Z. (2026). KONSTRUKSI MEDIA ATAS KONDISI FISKAL APBN KUARTAL I 2025: ANALISIS FRAMING GAMSON DAN MODIGLIANI PADA SEGMENT BISNIS YOUTUBE KOMPAS TV. RELASI: *Jurnal Penelitian Komunikasi* (e-ISSN: 2807-6818), 6(03), 1-8.
- Nuraini, I., Alzubair, E. A. S., Felisha, D. S., Maulana, A., & Amir, D. R. (2025, June). OPTIMALISASI NILAI Keadilan Sosial dalam Sila Kelima Pancasila sebagai upaya mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FPMIPA* (Vol. 3, No. 1, pp. 743-749).